

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, PENGANGGURAN, INVESTASI, JUMLAH PENDUDUK, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PDRB PER KAPITA, TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN (GINI RATIO) DI 12 PROVINSI PADA TAHUN 2019-2023

Wiji Rahayu Maratus Saidah Rohmah¹, Muhammad Daffa Ruddin Alwi², Marchelino Vidiyanto³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat e-mail rahayurhm02@gmail.com¹, daffaalwi55@gmail.com², marchelinouinsatu23@gmail.com³

Abstrak

Ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dibarengi dengan pemerataan hasil pembangunan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan simultan terhadap enam variabel yang dianalisis dalam satu model panel yang jarang ditemukan dalam studi sebelumnya dengan fokus beberapa wilayah saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel dengan metode *Generalized Least Squares* di Eviews 12, berdasarkan data sekunder dari 12 provinsi Indonesia selama periode 2018-2023. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio). Hasil uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil uji T menunjukkan bahwa Upah Minimum dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan, pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan Investasi, IPM dan PDRB Per Kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan pendapatan antarwilayah.

Kata Kunci: Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, IPM, PDRB Per Kapita

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu negara adalah tingkat kesejahteraan penduduknya, yang secara umum dapat diukur melalui pendapatan yang diperoleh masyarakat. Pendapatan bukan hanya mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga berfungsi sebagai cerminan distribusi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh negara. Apabila hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut belum sepenuhnya berhasil secara inklusif.

Meskipun di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi

nasional menunjukkan trend yang relatif stabil dan positif. Namun hasil pembangunan tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat secara merata. Salah satu bukti nyata dari kondisi tersebut adalah masih tingginya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu tantangan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, baik yang sedang berkembang maupun yang telah maju. Ketimpangan ini mencerminkan bagaimana pendapatan nasional tidak terbagi secara adil di antara seluruh lapisan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu masalah sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperlemah stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sesuai dengan Teori *Kuznets Curve* yang dikemukakan oleh Simon Kuznets. Teori ini menekankan bahwa ketidakmerataan atau

ketimpangan pendapatan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi setelah mencapai titik maksimum ketimpangan tersebut akan mengalami penurunan seiring berjalannya pembangunan ekonomi yang lebih baik. Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini diukur menggunakan Koefisien Gini. Konsep Gini Rasio atau koefisien Gini dikemukakan oleh ahli statistik Italia, yaitu Corrado Gini pada tahun 1912, yang berpendapat bahwa Gini Ratio merupakan instrument ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan, di mana nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi, sementara nilai yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah. Harry T. Oshima mengusulkan pembagian Gini Ratio menjadi tiga kategori yaitu: 1) ketimpangan dianggap rendah jika nilai Gini kurang dari 0,3, 2) tinggi jika lebih dari 0,5, 3) sedang jika berada di antara 0,3 hingga 0,5 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan data terkini, terdapat 12 provinsi di Indonesia yang tergolong dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang, dengan nilai indeks Gini berkisar antara 0,3 hingga 0,5. Daerah-daerah tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Sementara itu, provinsi lainnya tercatat memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Pada tahun 2019, DI Yogyakarta mencatatkan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi secara nasional dengan indeks Gini mencapai 0,429. Sebaliknya, Provinsi Banten menempati posisi dengan ketimpangan terendah sebesar 0,361. Situasi tersebut berlanjut hingga tahun 2023, di mana DI Yogyakarta kembali menjadi provinsi dengan ketimpangan tertinggi, yaitu sebesar 0,449. Di sisi lain, Banten tetap mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan ketimpangan terendah, meskipun indeksnya sedikit meningkat menjadi 0,368.

Kondisi ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi isu struktural di berbagai wilayah, terutama di provinsi-provinsi yang memiliki tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang

tidak merata. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai variabel yang berpotensi memengaruhi distribusi pendapatan, seperti upah minimum, tingkat pengangguran, realisasi investasi, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan adalah kebijakan upah minimum yang berperan sebagai batas bawah pendapatan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan menekan kesenjangan pendapatan antar kelompok. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai upah minimum antar provinsi yang cukup signifikan dapat memperbesar ketimpangan pendapatan antar wilayah terutama antara industri padat karya dan daerah tertinggal. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terjadi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di sebagian besar wilayah Indonesia, namun belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak dapat dipisahkan dari isu ketimpangan ekonomi dan perlu dipertimbangkan secara holistik agar tidak justru memperlebar jurang kesejahteraan antar wilayah, melainkan mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia.

Selain upah minimum, tingkat pengangguran juga merupakan variabel penting yang memengaruhi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Tingginya angka pengangguran mencerminkan tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi produktif, yang menyebabkan sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pendapatan tetap. Kondisi ini memperbesar kesenjangan antara kelompok yang bekerja dan yang tidak bekerja, serta berdampak pada daya beli masyarakat dan akses terhadap kebutuhan dasar. Mengacu pada

data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional berada di angka 5,32%, dengan beberapa provinsi mencatat angka di atas rata-rata nasional. Fenomena ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi regional. Jika tidak ditangani secara sistematis, pengangguran yang tinggi berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pengangguran harus menjadi perhatian utama dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Investasi merupakan salah satu faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Melalui investasi, khususnya dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diharapkan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun pada kenyataannya, distribusi investasi di Indonesia masih belum merata dan cenderung terpusat di wilayah-wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa. Ketimpangan ini menyebabkan daerah-daerah yang minim investasi sulit mengembangkan sektor ekonominya, sehingga jurang pendapatan antarwilayah semakin melebar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, realisasi PMDN nasional mencapai Rp674,92 triliun, namun sebagian besar terserap di wilayah-wilayah maju. Ketika investasi tidak tersebar secara proporsional, hanya sebagian wilayah yang memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan wilayah lain tertinggal dalam hal infrastruktur, kesempatan kerja, dan produktivitas. Akibatnya, distribusi pendapatan menjadi semakin timpang, dan tujuan pembangunan yang merata sulit untuk dicapai.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, terutama ketika pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan kesempatan kerja yang memadai. Wilayah dengan jumlah penduduk yang besar namun minim lapangan kerja dan infrastruktur pendukung cenderung mengalami tekanan

sosial dan ekonomi, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya daya beli masyarakat. Akibatnya, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata antara wilayah padat penduduk dan wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih kuat. Fenomena ini sejalan dengan realita di beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar namun masih tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan ketersediaan lapangan kerja justru akan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun IPM secara nasional menunjukkan tren peningkatan, namun capaian antarwilayah masih sangat timpang. Wilayah dengan IPM rendah cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap layanan dasar, sehingga penduduknya kurang mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Kondisi ini memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan karena kelompok dengan IPM tinggi memiliki peluang ekonomi yang jauh lebih besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, IPM Indonesia mencapai 74,39, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,71. Meskipun demikian capaian ini belum merata, karena beberapa daerah tertinggal menunjukkan angka yang masih jauh di bawah rata-rata tersebut. Oleh karena itu, rendahnya IPM di suatu daerah mencerminkan keterbatasan dalam mengakses kesempatan ekonomi dan sosial yang berdampak langsung terhadap distribusi pendapatan yang tidak merata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah indikator utama untuk mengukur kemakmuran ekonomi suatu daerah, yang mencerminkan nilai tambah bruto rata-rata per penduduk dalam setahun. Meskipun PDRB per kapita nasional terus meningkat, distribusinya masih sangat tidak merata antar provinsi. Konsentrasi pertumbuhan

ekonomi di kota besar dan pusat industri menyebabkan wilayah dengan aktivitas ekonomi terbatas tertinggal, memperburuk ketimpangan pendapatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, PDB per kapita Indonesia mencapai Rp75,0 juta. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen. Namun, peningkatan ini belum merata di seluruh provinsi. Beberapa daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, masih mencatat PDRB per kapita yang jauh di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, PDRB per kapita perlu dianalisis tidak hanya dari sisi angka nominalnya, tetapi juga dari segi pemerataan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara luas, karena perbedaan tajam dalam indikator ini berkontribusi besar terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan mencolok antar wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel upah minimum, tingkat pengangguran, investasi, jumlah penduduk, IPM, dan PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data, guna menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, serta sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara dua atau lebih variabel (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh entitas yang memiliki karakteristik sesuai dengan objek penelitian, yaitu provinsi-provinsi di Indonesia. Adapun teknik pengambilan

sampel yang diterapkan adalah non-probability sampling, di mana tidak semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel (Sugiyono, 2023). Sampel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari duabelas provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua yang dipilih secara sampling purposive. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara data silang (*cross-section*) dan data runtut waktu (*time series*) dari periode tahun 2019 hingga tahun 2023.

Data Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Gini Ratio diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, menggunakan bantuan perangkat lunak statistik yaitu *eviews 12* dengan metode analisis regresi data panel. Regresi Data Panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, yaitu unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda dengan pendekatan metode *Generalized Least Squares*, yang meliputi beberapa tahap, seperti uji asumsi klasik dan uji statistik. Model persamaan yang digunakan yaitu:

$$Y_{it} = C + \beta X1_{it} - \beta X2_{it} - \beta X3_{it} + \beta X4_{it} - \beta X5_{it} - \beta X6_{it} + e$$

Di mana:

Y = Gini Ratio

C = Konstanta

X1 = Upah Minimum

X2 = Pengangguran

X3 = Investasi

X4 = Jumlah Penduduk

X5 = Indeks Pembangunan Manusia

X6 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

i = Observasi (12 Provinsi)

t = Banyaknya waktu (2019-2023)

e = Error atau Variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penentuan Metode Analisis Data Panel

Dalam Regersi data panel terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam model panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Uji Chow, Hausmant, dan Lagrange Multiplier diperlukan untuk memilih model mana yang tepat untuk digunakan.

Uji Chow

Jika hasil analisis Chow memperlihatkan nilai probabilitas statistik F cross section di bawah 0,05, maka H0, yang menunjukkan bahwa FEM (*Fixed Effect Model*) lebih relevan digunakan. Sebaliknya jika analisis Chow menunjukkan nilai probabilitas statistik F cross section lebih dari 0,05, maka H1 diterima, yang berarti CEM (*Common Effect Model*) lebih sesuai untuk digunakan.

Tabel 1 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.837395	(11,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	91.876640	11	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa Model FEM (*Fixed Effect Model*) lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam penelitian ini. Uji Chow menghasilkan nilai probalibility chi square sebesar 0,0000, < 0,05. Hal ini berarti H0 diterima, yang menunjukkan bahwa Model FEM (*Fixed Effect Model*) lebih unggul dibandingkan dengan Model CEM (*Common Effect Model*).

Uji Hausman

Jika hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square Statistic di bawah 0,05, maka H0 diterima yang berarti bahwa Model FEM (*Fixed Effect Model*) lebih sesuai untuk digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Chi-Square Statistic yang diperoleh berada di atas 0,05, maka H1 diterima, sehingga REM (*Random Effect Model*) menjadi pilihan yang lebih tepat.

Tabel 2 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.623767	6	0.1007

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Hasil uji Husman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1007. Nilai tersebut di atas 0,05 dengan kata lain $0,1007 > 0,05$ yang mengindikasikan bahwa Model REM (*Random Effect Model*) lebih baik dibandingkan dengan Model FEM (*Fixed Effect Model*).

Uji Lagrange Multiplier

Jika nilai Probabilitas Breusch-Pagan (BP) lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan kata lain, model yang dianggap cocok adalah Model REM (*Random Effect Model*). Sebaliknya, nilai Probabilitas Breusch-Pagan (BP) lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan kata lain, model yang dianggap cocok adalah Model CEM (*Common Effect Model*).

Tabel 3 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	42.16420 (0.0000)	1.102645 (0.2937)	43.26685 (0.0000)

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Nilai probabilitas pada Uji Lagrange Multiplier adalah kurang dari 0,05 atau dengan kata lain nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ maka model yang tepat untuk digunakan dalam persamaan analisis regresi itu adalah Model REM (*Random Effect Model*).

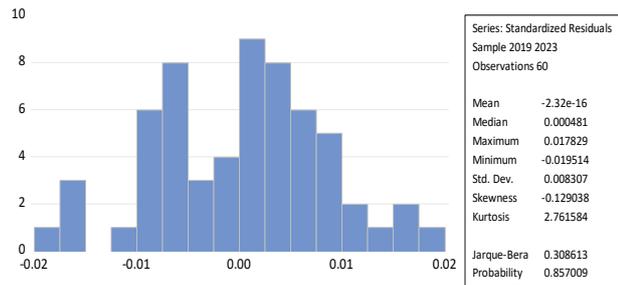
Berdasarkan pemilihan model dalam penelitian ini adalah REM (*Random Effect Model*). Alasan memilih REM (*Random Effect Model*) karena berdasarkan uji hausman nilai signifikannya lebih dari 0,05 dan uji langrange nilai signifikannya kurang dari 0,05. Model ini digunakan untuk melihat adanya pengaruh antara variabel Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah residual memiliki distribusi normal. Jika statistik JB lebih besar dari nilai Chi-Square atau p-value > 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika statistik

JB lebih kecil dari nilai Chi-Square atau p-value < 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal.



Tabel 4 Uji Normalitas

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh bahwa nilai probabilitas sebesar 0,857009 > 0.05 yang berarti bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dapat dilihat dari output Eviews 12, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
2. Jika nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 04/30/25 Time: 15:15
Sample: 2019 2023
Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.015867	2325.345	NA
UMP	0.000554	3343.727	2.509027
PENGANGGURAN	3.22E-07	2.534764	1.221488
INVESTASI	1.20E-05	29.12810	2.180648
JUMLAHPENDUDUK	5.91E-05	126.8191	2.214071
IPM	1.08E-05	18.55458	1.807034
PDRBPERKAPITA	0.000193	647.1700	2.833403

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sebab hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hasil tiap variabel independen tidak ada yang lebih dari 10. Dari variabel UMP (2,509 < 10), Pengangguran (1,221 < 10), Investasi (2,180 < 10), Jumlah Penduduk (2,214 < 10), IPM (1,807 < 10), PDRB Per Kapita (2,833 < 10). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

multikolinearitas pada antar variabel independen dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika variable independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika variabel independen tidak signifikan (sig > 0,05) berarti model bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.012894	0.052243	0.246807	0.8060
UMP	-0.000848	0.010652	-0.079610	0.9368
PENGANGGURAN	0.000110	0.000301	0.364822	0.7167
INVESTASI	-0.001028	0.001937	-0.530768	0.5978
JUMLAHPENDUDUK	0.001336	0.003041	0.439118	0.6624
IPM	-0.001181	0.001146	-1.030712	0.3074
PDRBPERKAPITA	-0.000280	0.005748	-0.048681	0.9614

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis yang ada, ditemukan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai Sig > 0,05, yaitu UMP (0,9363 > 0,05), Pengangguran (0,7167 > 0,05), Investasi (0,5978 > 0,05), Jumlah Penduduk (0,6624 > 0,05), IPM (0,3074 > 0,05), PDRB Per Kapita (0,9614 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merujuk pada kondisi di mana faktor-faktor pengganggu saling berhubungan satu sama lain. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model, kita dapat menggunakan nilai statistik Durbin-Watson (DW) yang diperoleh dari hasil regresi. Uji Durbin-Watson ini memungkinkan kita untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta di dalam model tersebut.

Tabel 7 Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.516810	Mean dependent var	0.126859
Adjusted R-squared	0.462109	S.D. dependent var	0.005848
S.E. of regression	0.004289	Sum squared resid	0.000975
F-statistic	9.447951	Durbin-Watson stat	2.068576
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Menurut aturan uji Durbin Watson (DW), penelitian tidak memiliki autokorelasi jika nilai $DU < DW < 4 - DU$. Hasil penelitian menunjukkan nilai statistik $1,8082 < 2,068576 < 2,1918$, yang menunjukkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi positif atau negatif.

Uji Statistik

Uji T

Dasar pengambilan keputusan pada uji T juga dapat dilihat dari nilai t-hitung dan nilai probabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai t-hitung > t-tabel dan nilai probabilitas < 0,05 artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Jika t-hitung < t-tabel dan nilai probabilitas > 0,05 artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 8 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.561856	0.125963	4.460475	0.0000
UMP	0.056605	0.023544	2.404203	0.0197
PENGGANGGURAN	-0.000296	0.000568	-0.521412	0.6043
INVESTASI	-0.021537	0.003464	-6.217251	0.0000
JUMLAHPENDUDUK	0.015877	0.007690	2.064671	0.0439
IPM	-0.021380	0.003287	-6.505222	0.0000
PDRBPERKAPITA	-0.043102	0.013896	-3.101755	0.0031

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Adapun hasil pengujian hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial upah minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) pada 12 provinsi di Indonesia. Hal ini di tunjukkan secara statistik nilai t hitung > t tabel atau $2,4042 > 2,0057$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0197 < 0,05$.
2. Secara parsial tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) pada 12 provinsi di Indonesia. Hal ini di tunjukkan secara statistik nilai t hitung > t tabel atau $-0,5214 < 2,0057$ dan nilai signifikansi sebesar $0,6043 > 0,05$.
3. Secara parsial investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) pada 12 provinsi di Indonesia. Hal ini di tunjukkan secara statistik nilai t

hitung > t tabel atau $-6,2172 > 2,0057$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$.

4. Secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) pada 12 provinsi di Indonesia. Hal ini di tunjukkan secara statistik nilai t hitung > t tabel atau $2,0646 > 2,0057$ dan nilai signifikansi sebesar $0.0439 < 0,05$.
5. Secara parsial indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) pada 12 provinsi di Indonesia. Hal ini di tunjukkan secara statistik nilai t hitung > t tabel atau $-6,5052 > 2,0057$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$.

Secara parsial produk domestik regional bruto (PDRB Per Kapita) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) pada 12 provinsi di Indonesia. Hal ini di tunjukkan secara statistik nilai t hitung > t tabel atau $-3,1017 > 2,0057$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0031 < 0,05$.

Uji F

Uji signifikansi simultan (Uji F) dilaksanakan untuk mengukur seberapa signifikan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan.

Tabel 9 uji F

Weighted Statistics			
R-squared	0.516810	Mean dependent var	0.126859
Adjusted R-squared	0.462109	S.D. dependent var	0.005848
S.E. of regression	0.004289	Sum squared resid	0.000975
F-statistic	9.447951	Durbin-Watson stat	2.068576
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan regresi data panel, nilai F hitung $9,447951 > F$ tabel $2,38607$ dan nilai probabilitas F $0,000000$ lebih kecil dari $\alpha < 0.05$, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel independen, yaitu upah minimum, pengangguran, investasi, jumlah penduduk, indeks Pembangunan manusia (IPM), dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai seberapa efektif variabel-variabel independen secara bersama-sama menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berada dalam

rentang antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin tinggi angka R^2 , semakin besar variasi pada variabel dependen. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP), Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Tabel 10 Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.516810	Mean dependent var	0.126859
Adjusted R-squared	0.462109	S.D. dependent var	0.005848
S.E. of regression	0.004289	Sum squared resid	0.000975
F-statistic	9.447951	Durbin-Watson stat	2.068576
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Melihat dari nilai Adjusted R Squared yang mencapai 0,462109, ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara variabel independent dan variabel dependen dalam studi ini adalah 46%. Sementara itu, 54% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Persamaan Regresi Data Panel

Adapun hasil regresi data panel REM (Random Effect Model) adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Persamaan Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.561856	0.125963	4.460475	0.0000
UMP	0.056605	0.023544	2.404203	0.0197
PENGANGGURAN	-0.000296	0.000568	-0.521412	0.6043
INVESTASI	-0.021537	0.003464	-6.217251	0.0000
JUMLAHPENDUDUK	0.015877	0.007690	2.064671	0.0439
IPM	-0.021380	0.003287	-6.505222	0.0000
PDRBPERKAPITA	-0.043102	0.013896	-3.101755	0.0031

Sumber: Hasil Eviews 12, Data Diolah (2025)

Persamaan regresi yang dapat disusun di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0,56 + 0,06 X_{1it} - 0,0003 X_{2it} - 0,022 X_{3it} + 0,016 X_{4it} - 0,021 X_{5it} - 0,043 X_{6it} + e$$

Di mana:

Y = Gini Ratio

X₁ = Upah Minimum

X₂ = Pengangguran

X₃ = Investasi

X₄ = Jumlah Penduduk

X₅ = Indeks Pembangunan Manusia

X₆ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

i = Observasi (12 Provinsi)

t = Banyaknya waktu (2019-2023)

e = Error atau Variabel pengganggu

Interpretasi hasil regresi data panel dalam penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,56 artinya apabila upah minimum, pengangguran, investasi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik bruto regional per kapita bernilai konstan atau tetap maka nilai gini ratio akan tetap sebesar 0,56%.
2. Nilai koefisien regresi upah minimum sebesar 0,06 menunjukkan hubungan positif yang memberikan arti jika upah minimum bertambah 1 akan terjadi kenaikan gini ratio sebesar 0,06%. Sebaliknya jika upah minimum berkurang 1 akan terjadi penurunan gini ratio sebesar 0,06%.
3. Nilai koefisien regresi pengangguran sebesar -0,0003 menunjukkan hubungan negatif yang memberikan arti jika pengangguran bertambah 1 akan terjadi penurunan gini ratio sebesar 0,0003%. Sebaliknya jika pengangguran berkurang 1 akan terjadi kenaikan gini ratio sebesar 0,0003%. Tetapi efek ini tidak signifikan secara statistik.
4. Nilai koefisien regresi investasi sebesar -0,022 menunjukkan hubungan negatif yang memberikan arti jika investasi bertambah 1 akan terjadi penurunan gini ratio sebesar 0,022%. Sebaliknya jika investasi berkurang 1 akan terjadi kenaikan gini ratio sebesar 0,022%.
5. Nilai koefisien regresi jumlah penduduk sebesar 0,016 menunjukkan hubungan positif yang memberikan arti jika jumlah penduduk bertambah 1 akan terjadi kenaikan gini ratio sebesar 0,016%. Sebaliknya jika jumlah penduduk berkurang 1 akan terjadi penurunan gini ratio sebesar 0,016%.
6. Nilai koefisien regresi indeks pembangunan manusia sebesar -0,021 menunjukkan hubungan negatif yang memberikan arti jika indeks pembangunan manusia bertambah 1 akan terjadi penurunan gini ratio sebesar 0,021%. Sebaliknya jika indeks pembangunan

manusia berkurang 1 akan terjadi kenaikan gini ratio sebesar 0,022%.

7. Nilai koefisien regresi produk domestik regional bruto per kapita sebesar -0,043 menunjukkan hubungan negatif yang memberikan arti jika produk domestik regional bruto per kapita bertambah 1 akan terjadi penurunan gini ratio sebesar 0,043%. Sebaliknya jika produk domestik regional bruto per kapita berkurang 1 akan terjadi kenaikan gini ratio.

Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t dapat disimpulkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) di 12 provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2019-2023. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, justru ketimpangan pendapatan semakin melebar. Walaupun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan teori kesejahteraan sosial yang dikemukakan Paul. A. Samuelson. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum seharusnya membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan pendapatan pekerja yang berpenghasilan rendah. Namun, dalam kenyataannya, kenaikan upah minimum seringkali tidak dinikmati secara merata, terutama di negara berkembang dengan segmen tenaga kerja informal yang dominan. Hal ini selaras dengan teori dualisme pasar tenaga kerja menjelaskan struktur ketenagakerjaan yang terbagi menjadi sektor formal dan informal. Di Indonesia, sektor informal menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun kebijakan upah minimum umumnya hanya berlaku efektif pada sektor formal. Todaro dan Smith (2015) dalam *Economic Development* menyatakan bahwa di negara berkembang, seperti Indonesia, kebijakan upah minimum seringkali hanya menguntungkan sebagian kecil pekerja formal dan tidak menyentuh kelompok pekerja informal. Oleh karena itu, kenaikan upah minimum justru memperluas kesenjangan antara pekerja formal yang mendapat kenaikan

pendapatan dengan pekerja informal yang tidak mendapat perlindungan serupa. Situasi ini memperkuat ketimpangan pendapatan antar kelompok pekerja.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Helmy et al., 2024) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan karena upah minimum hanya mempengaruhi sektor formal dan tidak mempengaruhi sektor informal. Hal serupa juga di temukan di penelitian yang dilakukan oleh (Astary et al. 2024) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena adanya tenaga kerja yang tidak menerima upah sesuai dengan UMP atau merupakan pekerja informal.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) di 12 provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2019-2023. Hal ini dapat diartikan peningkatan atau penurunan pengangguran tidak secara langsung memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini bertentangan dengan teori ekonomi klasik yang di kemukakan Adam Smith yang menyatakan bahwa pengangguran berkorelasi positif terhadap ketimpangan pendapatan karena semakin tinggi jumlah pengangguran, maka semakin besar kelompok masyarakat tanpa penghasilan tetap, yang memperlebar kesenjangan pendapatan. Ketidaksesuaian antara hasil penelitian penulis terhadap teori ekonomi klasik tersebut terhadap kondisi 12 provinsi di Indonesia pada kurun waktu antara tahun 2019 hingga 2023 dapat memiliki beberapa alasan yang logis yaitu adanya program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Pra Kerja atau Jaminan Sosial. Kemudian tingginya proporsi sektor informal dimana banyak individu yang secara statistik di kategorikan sebagai pengangguran justru masih memiliki pendapatan dari pekerjaan informal, sehingga tidak secara nyata mempengaruhi distribusi

pendapatan secara agregat dan ketimpangan pendapatan lebih didorong oleh faktor lain. Namun hal ini sejalan dengan teori *Segmented Labor Market* yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2015) dalam buku *Economic Development* menyatakan bahwa pasar tenaga kerja di negara berkembang bersifat tersegmentasi antara sektor formal dan informal, di mana mobilitas antar sektor sangat terbatas. Dengan kondisi demikian, indikator pengangguran konvensional tidak dapat merepresentasikan keseluruhan ketimpangan karena banyak pekerja yang tidak tercatat sebagai penganggur tetapi tetap memiliki pendapatan rendah. Lebih lanjut, Mankiw (2010) dalam *Principles of Economics* menekankan bahwa ketimpangan pendapatan lebih sering disebabkan oleh perbedaan dalam produktivitas dan kualitas pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pengangguran.

Selain itu hasil penelitian ini juga di perkuat oleh temuan (Astary et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia karena pengangguran sering kali lebih banyak terjadi di sektor-sektor dengan upah rendah, seperti pertanian dan pekerjaan informal, yang tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang lebih besar antara kelompok atas dan bawah. Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan (Maghriza & Hasmarini, 2024) menunjukkan hal serupa dimana tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena dalam konteks DIY, variasi dalam tingkat pengangguran mungkin tidak cukup besar atau tidak merata untuk mempengaruhi distribusi pendapatan secara signifikan dan menurut (Ati et al., 2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota Jawa Timur tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara individu. Tidak berpengaruhnya TPT terhadap kenaikan atau penurunan ketimpangan pendapatan dikarenakan tiga sektor sumber penghasilan utama tersebut bergerak sesuai permintaan pasar

Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t, dapat disimpulkan bahwa Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) di 12 provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2019-2023. Dari hasil uji tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan investasi dengan indikator Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah yang diteliti. Hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Investasi dalam negeri umumnya direalisasikan dalam sektor-sektor padat karya seperti industri dan konstruksi yang memiliki kapasitas besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Penyerapan tenaga kerja ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat kelompok bawah sehingga memperkecil disparitas pendapatan. Hubungan antara investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat di jelaskan melalui teori pertumbuhan atau lebih dikenal dengan teori Harrod-Domar. Menurut teori ini, investasi yang meningkat akan meningkatkan output nasional dan menciptakan lapangan kerja melalui perluasan kapasitas produksi. Oleh karena itu, ketika investasi meningkat, terutama pada sektor-sektor padat karya, maka tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin dan menengah ke bawah akan lebih banyak terserap, sehingga pendapatan mereka meningkat dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan. Pemilihan teori Harrod-Domar menjadi relevan karena teori ini menyoroti pentingnya investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan di negara berkembang, seperti Indonesia, yang masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antarwilayah maupun antarindividu.

Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartini 2022) yang menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Naiknya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita naik karena adanya kegiatan-kegiatan produktif.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) di 12 provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2019-2023. Dari hasil uji tersebut dapat diartikan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan lapangan kerja, justru memperbesar kelompok miskin. Akibatnya, pendapatan nasional semakin terkonsentrasi pada kelompok kaya. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi ini sejalan dengan teori *Human Capital* dari Becker (1993) yang menyatakan bahwa kualitas penduduk, bukan hanya kuantitasnya, yang menentukan produktivitas dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanpa investasi yang cukup pada pendidikan dan keterampilan, pertumbuhan penduduk yang cepat justru berpotensi menjadi beban pembangunan dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Sukirno (2016) juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi hanya akan efektif bila diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang sangat bergantung pada kualitas penduduk. Dukungan empiris terhadap argumen ini juga dapat ditemukan dalam laporan UNDP (2020) yang menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, lonjakan jumlah penduduk cenderung meningkatkan ketimpangan jika tidak diikuti dengan pemerataan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan produktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pola yang serupa dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Firdaus & Indira Hasmarini, 2023) yang menyatakan bahwa angka jumlah penduduk (POP) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap variable ketimpangan pendapatan, angka jumlah penduduk di suatu wilayah cenderung menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan upah yang ia dapatkan, hal ini tentu saja menjadi

penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Hal yang sama juga tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ati et al., (2024) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan secara individu terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka menyebabkan peningkatan dalam persaingan dunia kerja, maka seseorang dengan kualitas SDM rendah akan kalah dalam persaingan kerja yang mengakibatkan persaingan semakin ketat. Kondisi ini bisa mempertinggi tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan juga meningkat. Selanjutnya menurut (Dessie, 2025) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat. Pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja, yang menekan upah dan memperlebar kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) di 12 provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2019-2023. Dari hasil uji tersebut dapat diartikan peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena IPM mengukur kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Ketika IPM meningkat maka kualitas sumber daya manusia juga meningkat, yang pada akhirnya memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan Teori *Human Capital* dari Becker (1993) yang menyatakan bahwa investasi pada manusia, khususnya melalui pendidikan dan kesehatan, akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pendidikan, sebagai salah satu komponen utama IPM, secara langsung meningkatkan kapabilitas individu untuk bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga memperluas akses terhadap sumber pendapatan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memperkuat mobilitas sosial dan mengurangi hambatan struktural yang menyebabkan ketimpangan.

Bukti empiris juga diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Helmy et al., 2024) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena masyarakat dengan IPM tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan, yang meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selanjutnya menurut (Yoertiara & Feriyanto, 2022) indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Jawa. Saat pendidikan dapat dicapai oleh semua orang, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka karena adanya pengetahuan dan kualitas dalam diri seseorang yang akhirnya akan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Di dukung juga oleh penelitian (Makipantung et al., 2023) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dan menurut (Maorencia & Marwan, 2023) Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) mencerminkan bahwa indeks pembangunan manusia meningkat, maka kesehatan dan pendidikan juga meningkat yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya produktifitas manusia yang diakibatkan oleh tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM) tersebut. Ketika tingginya rata-rata pendapatan yang diterima, maka tingkat ketimpangan pendapatan juga menurun.

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t dapat disimpulkan bahwa PDRB Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) di 12 provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2019-2023. Dari hasil uji tersebut dapat diartikan peningkatan PDRB per kapita dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Jika pertumbuhan ini bersifat inklusif dan tersebar merata, maka ketimpangan dapat ditekan karena lebih banyak orang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Teori Kurva Kuznets yang terkenal dengan Kurva U Terbalik (*Inverted U Hypothesis*). Menurut Simon Kuznets, pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan memang akan meningkat karena manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Namun, ketika pembangunan sudah memasuki tahap menengah dan lanjut, distribusi pendapatan akan semakin merata karena investasi dan kesempatan kerja menyebar ke kelompok masyarakat bawah. Oleh karena itu, pada tahap lanjut, pertumbuhan PDRB per kapita akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Hipotesis ini secara empiris banyak ditemukan dalam proses pembangunan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Janah, 2022) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto PerKapita (PDRBPKP) memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan karena tingginya nilai PDRBPKP mencerminkan keberhasilan suatu wilayah atau daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia dan menurut (Gini, Wiza, 2023) mengungkap bahwa tingkat PDRB perkapita (X) negatif terhadap tingkat disparitas pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia (Y).

PENUTUP Simpulan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum serta jumlah

penduduk memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pelebaran ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya, variabel seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap ketimpangan, menandakan bahwa ketiganya berperan dalam mempersempit jurang ketimpangan tersebut. Sementara itu, tingkat pengangguran secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pendapatan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa strategi pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan optimalisasi investasi dalam negeri dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meredam ketimpangan sosial-ekonomi. Di sisi lain, kebijakan pengupahan minimum yang tidak menyentuh sektor informal atau tidak diterapkan secara menyeluruh berpotensi memperparah kesenjangan pendapatan. Secara konseptual, studi ini memperluas cakrawala teori tentang kebijakan upah minimum yang, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial, bisa saja menghasilkan efek yang kontraproduktif bila implementasinya timpang. Dari sisi empiris, penelitian ini menyumbangkan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dalam menilai kembali efektivitas berbagai intervensi ekonomi terhadap aspek keadilan distribusi.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, terutama karena penggunaan data agregat yang kurang mampu menangkap dinamika sosial-ekonomi di tingkat individu maupun karakteristik khas sektor informal. Selain itu, pengukuran pengangguran dalam studi ini masih bersifat makro dan tidak memisahkan jenis-jenis pengangguran yang mungkin memiliki implikasi berbeda terhadap distribusi pendapatan. Keterbatasan tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan data dan ruang lingkup penelitian, bukan kekurangan dalam pendekatan metodologis. Oleh sebab itu, studi lanjutan disarankan untuk menggunakan data mikro, menyertakan variabel kelembagaan, dan mengeksplorasi dinamika sektor informal

secara lebih rinci guna memperkuat akurasi serta relevansi kebijakan yang dihasilkan dari analisis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astary, R., Safitri, N., Zarpani, Z., & Harahap, E. F. (2024). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(1), 106–115.
<https://doi.org/10.31869/me.v10i1.5293>
- Ati, M., Ariasta, A., Iriani, R., & Setiawati, S. (2024). Dampak TPT , IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Melebarnya Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Jawa Timur The Impact of TPT , HDI and Population on the Widening Income Inequality between Regions in East Java. 15(225), 697–713.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v15i3.10361>. Article
- Basuki, Tri, A. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews). Buku Referensi, 1–160.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Ekonomi, J. J., Salzabilah, F. Y., Somoy, S., Sambeko, T., Indah, A., Hafifa, N., & Ekonomi, J. J. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Mimika Abstrak. 11(1), 56–67.
- Firdaus, A., & Indira Hasmarini, M. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 116–123.
<https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2128>

- Fitriani, Eka., dkk. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 5(2), 182-188
- Hartini, N. T. (2020). Pengaruh Pdrb Per Kapita, Investasi Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Diy Tahun 2016-2020. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539.
- Helmy, A., Nujum, S., & Selong, A. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 2024–2907.
- Irawan, D., Baiq, S, W., dan Muhammad, B, H., (2024). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3). <https://doi.org/10.36985/y23kbn87>
- Janah, M. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pdrb Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 23–43. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183>
- Jurnal, E., Pembangunan, I., Dan, M., Pengangguran, T., Maghriza, M. R., & Hasmarini, M. I. (2024). *TERBUKA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2010-2023 The Influence of the Number of Poor People , Minimum Wage , Human Development Index , and Open Unemployment Rate on Income Inequality in Yogyakarta (2010-2023)*. 8, 304–311.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Makipantung, R. O., Walewangko, E. N., Niode, A. O., & Makipantung, R. O. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 157–168.
- Maorencia, Q. M., & Marwan, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Arzusin*, 3(5), 571–580. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v3i5.1672>
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-5 Bandung: ALFABETA CV.
- Sukirno, S. (2016). *Teori Pengantar Makroekonomi* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org>
- Wiza, Y. (2023). Pengaruh PDRB perkapita terhadap disparitas pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2017 - 2021 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2). <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7756>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol11.iss1.art9>

Yuliana, D., & Rosyadi. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kalimantan Barat. *Journal of Economics and Business UBS*, 14 (1), 27-47